

EVALUASI PROGRAM KIP KULIAH DALAM MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) PENDIDIKAN DI KOTA BENGKULU

Received : 11-07-2025 Revised : 15-09-2025 Accepted : 28-12-2025

¹Esther Layantara, ²Henny Aprianty, ³Rahiman Dani

^{1,2,3}Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

estherlayantara@gmail.com, hennyaprianty666@gmail.com, ahimandani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan Program KIP Kuliah (KIP Aspirasi) serta kontribusinya terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dimensi pendidikan di Kota Bengkulu. Fokus penelitian diarahkan pada perluasan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta dampaknya terhadap indikator pendidikan, khususnya angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan periode penelitian tahun 2024. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan perguruan tinggi, serta data statistik pendidikan. Penelitian ini melibatkan 11 informan kunci, yang terdiri atas operator pengelola Program KIP Aspirasi pada dua perguruan tinggi di Kota Bengkulu (Universitas Prof. Dr. Hazairin/UNIHAZ dan STIKes Sapta Bakti), pimpinan perguruan tinggi (Rektor UNIHAZ dan Ketua STIKes Sapta Bakti), dua mahasiswi penerima KIP Kuliah, dua orang tua mahasiswi, Anggota DPR RI Komisi X, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, serta Plt. Kepala BPS Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama, yaitu: (1) Program KIP Kuliah efektif meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi bagi kelompok ekonomi rentan dan berkontribusi positif terhadap penguatan IPM bidang pendidikan; (2) masih terdapat kendala pada aspek pemerataan informasi dan ketepatan sasaran penerima akibat keterbatasan proses verifikasi data; dan (3) besaran bantuan biaya hidup dinilai belum sepenuhnya mencukupi untuk mendukung keberlanjutan studi mahasiswa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program KIP Kuliah memiliki peran strategis dalam peningkatan IPM pendidikan di Kota Bengkulu, namun memerlukan penguatan tata kelola agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan kualitatif dan cakupan wilayah penelitian yang terbatas.

Kata Kunci: Kartu Indonesia Pintar, Evaluasi Kebijakan, Indeks Pembangunan Manusia, Pendidikan

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of the KIP Kuliah Program (KIP Aspirasi) and its contribution to improving the Human Development Index (HDI) in the education dimension in Bengkulu City. The focus of the study is directed at expanding access to higher education for low-income communities and its impact on education indicators, especially literacy rates and average length of schooling. This study uses a qualitative descriptive approach with a research period of 2024. The research data consists of primary and secondary data. Primary data were collected through in-depth interviews and observations, while secondary data were obtained from policy documents, university reports, and educational statistics data. This study involved 11 key informants, consisting of KIP Aspirasi Program management operators at two universities in Bengkulu City (Prof. Dr. Hazairin University/UNIHAZ and STIKes Sapta Bakti), university leaders (UNIHAZ Rector and Head of STIKes Sapta Bakti), two female KIP Kuliah recipients, two female students' parents, a member of the Indonesian House of Representatives Commission X, the Secretary of the Bengkulu Province Education and Culture Office, and the Acting Head of the Bengkulu City Statistics Agency. The research results show three main findings: (1) the KIP Kuliah Program effectively increases participation in higher education for vulnerable economic groups and contributes positively to strengthening the Human Development Index (HDI) in the education sector; (2) there are still obstacles in the aspect of information equity and accuracy of recipient targeting due to limitations in the data verification process; and (3) the amount of living cost assistance is deemed insufficient to support the sustainability of student studies. This study concludes that the KIP Kuliah Program plays a strategic role in increasing the HDI in education in Bengkulu City, but requires strengthening governance to be more

targeted and sustainable. The limitations of this research lie in the qualitative approach and the limited scope of the research area.

Keyword: *Indonesia Smart Card for College, Policy Evaluation, Human Development Index, Education*

PENDAHULUAN

Evaluasi Program KIP Kuliah menjadi dasar penting dalam melihat kontribusi kebijakan pendidikan tinggi terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) saat ini, khususnya pada dimensi pendidikan. Melalui evaluasi, dapat diketahui sejauh mana program ini berperan dalam meningkatkan indikator IPM, Namun demikian, evaluasi terhadap penerima Program KIP Kuliah masih menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam memastikan ketepatan sasaran, keberlanjutan studi, serta dampak jangka panjang terhadap capaian pendidikan. Ketidaktepatan dalam evaluasi penerima berpotensi mengaburkan kontribusi nyata program terhadap IPM, sehingga menyulitkan perumusan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan IPM pada periode selanjutnya. Hasil temuan meunjukkan bahwa Program KIP pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, yaitu ketidakakuratan data penerima, ketidaktepatan distribusi dan penggunaan dana, keterbatasan kuota bagi masyarakat miskin, serta belum terlihatnya dampak signifikan terhadap prestasi belajar siswa penerima KIP (Ninghardjanti et al., 2023). Hasil penelitian ini juga menyoroti bahwa Program KIP dinilai berjalan efektif dan memperoleh respons positif dari masyarakat, terutama dalam aspek pendanaan, serta berkontribusi dalam menekan angka putus sekolah.

Program KIP pelaksanaannya berdampak langsung pada capaian pendidikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pada dimensi harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan angka melek huruf. kualitas IPM dengan menunjukkan bahwa 22 indikator SDGs dari pemerintah provinsi Indonesia pada 2018-2019(Yuliansyah, 2021). Hasilnya korelasi positif antara pengeluaran pendidikan dan pemenuhan pendidikan berkualitas dari pendidikan kualitas IPM dengan melalui pengeluaran pendidikan, kualitas pendidikan akan meningkat dan IPM diharapkan meningkat (Setyaningrum, 2024). Dalam konteks tersebut, penelitian terhadap mahasiswa penerima KIP Kuliah di Bengkulu menjadi sangat penting. Meskipun capaian IPM yang relatif tinggi dibandingkan wilayah lain di provinsi yang sama, kondisi ekonomi sebagian masyarakat perkotaan masih menunjukkan adanya kelompok rentan yang menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan tinggi. Kota Bengkulu merupakan wilayah dengan capaian IPM tertinggi di Provinsi Bengkulu, yaitu sebesar 83,38 pada tahun 2023. Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) di kota ini mencapai 16,06 tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) berada pada angka 11,83 (Firlian et al., 2025). Angka-angka ini menggambarkan adanya keberhasilan dalam penyediaan dan partisipasi pendidikan. Namun, tingginya angka tersebut belum menjamin pemerataan akses, terutama bagi kelompok miskin perkotaan yang masih menghadapi keterbatasan biaya pendidikan dan kebutuhan hidup dasar dan ketimpangan ekonomi dalam kota justru menuntut hadirnya kebijakan afirmatif berbasis pemerataan sosial.

Meskipun Program KIP Kuliah telah menjadi salah satu kebijakan sebagai indikator peningkatan IPM , hingga saat ini masih terbatas penelitian yang menyajikan evaluasi program secara komprehensif dengan

mengintegrasikan berbagai dimensi evaluasi kebijakan. Sehingga diperlukan analisis dalam aspek administratif, tingkat penyerapan anggaran, atau persepsi kepuasan penerima manfaat. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya mampu menjelaskan apakah Program KIP Kuliah telah berjalan efektif dalam mencapai tujuan substantifnya, yaitu meningkatkan capaian pendidikan dan berkontribusi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Indri Arrafi Juliannisa & Siswantini, 2019a; Neysa Aulia et al., 2024; Setyaningrum, 2024). Evaluasi yang mencakup efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan sasaran masih jarang dilakukan secara terpadu sangat penting untuk menilai kualitas implementasi kebijakan public. Tanpa analisis yang menyeluruh, keberhasilan program berisiko dipahami secara parsial dan tidak mampu menggambarkan dampak riil KIP Kuliah terhadap pembangunan manusia, khususnya pada dimensi pendidikan.

Selain itu, keterbatasan penelitian yang secara eksplisit mengaitkan hasil evaluasi Program KIP Kuliah dengan indikator IPM pendidikan menjadi celah penting dalam kajian kebijakan pendidikan tinggi. IPM tidak hanya mencerminkan output jangka pendek, tetapi juga outcome jangka panjang dari investasi pendidikan yang dilakukan pemerintah. Oleh karena itu, evaluasi KIP Kuliah yang tidak mengaitkan program dengan perubahan pada Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan keberlanjutan pendidikan mahasiswa akan sulit digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan. Penelitian yang mengintegrasikan dimensi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan sasaran dengan analisis dampak terhadap IPM masih sangat terbatas, terutama pada konteks wilayah tertentu seperti Kota Bengkulu yang memiliki capaian IPM relatif tinggi namun masih menghadapi ketimpangan ekonomi. Ketiadaan kajian semacam ini menyebabkan kurangnya bukti empiris yang kuat untuk menilai apakah Program KIP Kuliah benar-benar menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas IPM pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan evaluasi kebijakan yang komprehensif dan kontekstual, sekaligus memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam perumusan kebijakan pendidikan tinggi yang lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan pembangunan manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) serta kontribusinya terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dimensi pendidikan di Kota Bengkulu. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konteks kebijakan, persepsi para aktor yang terlibat, serta dinamika pelaksanaan program dalam lingkungan sosial yang kompleks (Moleong, 2010). Penelitian ini tidak menekankan pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada eksplorasi makna, proses, dan dampak substantif pelaksanaan Program KIP Kuliah terhadap capaian pembangunan manusia.

Lokasi penelitian ditetapkan secara purposive di tiga perguruan tinggi di Kota Bengkulu yang aktif

melaksanakan Program KIP Kuliah, yaitu Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH (UNIHAZ), STIKes Sapta Bakti, dan STIKes Bakti Husada. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa ketiga institusi memiliki jumlah penerima KIP Kuliah yang relatif signifikan, sehingga relevan untuk menggambarkan implementasi program secara lebih komprehensif. Penelitian ini dilaksanakan pada periode 2022–2023, yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi Program KIP Kuliah. Fokus penelitian diarahkan pada dua aspek utama, yaitu bagaimana kebijakan KIP Kuliah diimplementasikan di tingkat perguruan tinggi serta bagaimana dampaknya terhadap indikator pendidikan dalam IPM.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* (Indri Arrafi Juliannisa & Siswantini, 2019a; Ninghardjanti et al., 2023), yakni pemilihan informan secara sengaja berdasarkan tingkat keterlibatan, pengetahuan, dan peran strategisnya dalam pelaksanaan serta evaluasi Program KIP Kuliah. Informan penelitian meliputi mahasiswa penerima KIP Kuliah dan orang tua mahasiswa sebagai penerima manfaat langsung, operator pengelola program di tingkat perguruan tinggi, pimpinan perguruan tinggi sebagai pengambil kebijakan institusional, anggota DPR RI Komisi X sebagai representasi pembuat dan pengawas kebijakan pendidikan nasional, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu sebagai perumus kebijakan pendidikan daerah, serta Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu sebagai penyedia data indikator IPM. Pemilihan informan dari berbagai tingkat ini diharapkan mampu memberikan perspektif yang utuh, mulai dari implementasi teknis hingga implikasi kebijakan makro.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan panduan semi-terstruktur, observasi partisipatif, serta studi dokumentasi yang meliputi kebijakan internal perguruan tinggi, laporan pelaksanaan Program KIP Kuliah, dan data statistik resmi dari Badan Pusat Statistik. Penggunaan berbagai teknik pengumpulan data tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dan memungkinkan terjadinya triangulasi sumber dan metode, sehingga dapat meningkatkan keabsahan dan kedalaman analisis temuan penelitian (Sugino, 2019). Adapun daftar informan penelitian beserta jabatan dan pertimbangan pemilihannya disajikan secara rinci pada Tabel 1.

Tabel 1. Informan Penelitian dan Alasan Pemilihannya

No	Informan	Jabatan/Pekerjaan	Pertimbangan Pemilihan Informan
1	Informan 1	Operator Pengelola Program KIP Aspirasi UNIHAZ	Memiliki pengetahuan teknis dan administratif terkait proses seleksi, verifikasi data, penyaluran, serta pengelolaan Program KIP Kuliah di tingkat perguruan tinggi. Informan ini penting untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran pelaksanaan program.
2	Informan 2	Operator Pengelola Program KIP Aspirasi STIKes Sapta Bakti	Berperan langsung dalam implementasi KIP Kuliah di perguruan tinggi swasta bidang kesehatan, sehingga dapat memberikan perspektif perbandingan terkait pelaksanaan program, kendala teknis, dan

			responsivitas sistem di tingkat institusi.
3	Informan 3	Rektor UNHAZ	Sebagai pengambil kebijakan di tingkat perguruan tinggi, informan ini memiliki kewenangan strategis dalam perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan terkait implementasi KIP Kuliah, serta mampu memberikan penilaian kebijakan pada aspek kecukupan dan keberlanjutan program.
4	Informan 4	Ketua STIKes Sapta Bakti	Memiliki peran strategis dalam pengelolaan kelembagaan dan kebijakan akademik, sehingga relevan untuk menilai dampak Program KIP Kuliah terhadap keberlanjutan studi mahasiswa dan pemerataan akses pendidikan tinggi di institusi yang dipimpinnya.
5	Informan 5	Mahasiswi Penerima KIP Kuliah UNHAZ	Merupakan penerima manfaat langsung Program KIP Kuliah, sehingga dapat memberikan informasi empiris terkait manfaat program, kecukupan bantuan, dampak terhadap keberlanjutan studi, serta pengalaman akademik dan ekonomi selama menerima KIP Kuliah.
6	Informan 6	Mahasiswi Penerima KIP Kuliah STIKes Sapta Bakti	Memberikan sudut pandang penerima manfaat dari konteks institusi dan bidang studi yang berbeda, sehingga memperkaya analisis dampak program terhadap prestasi akademik, motivasi belajar, dan kondisi sosial-ekonomi mahasiswa.
7	Informan 7	Orang Tua Mahasiswi Penerima KIP Kuliah UNHAZ	Mewakili perspektif keluarga penerima manfaat, khususnya dalam menilai perubahan beban ekonomi rumah tangga dan kontribusi KIP Kuliah terhadap keberlanjutan pendidikan anak.
8	Informan 8	Orang Tua Mahasiswi Penerima KIP Kuliah STIKes Sapta Bakti	Memberikan informasi pembandingan mengenai dampak ekonomi dan sosial program dari sisi keluarga penerima manfaat di perguruan tinggi lain.
9	Informan 9	Anggota DPR RI Komisi X	Memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran di bidang pendidikan, sehingga relevan untuk menilai kesesuaian kebijakan KIP Kuliah dengan tujuan nasional pendidikan dan kontribusinya terhadap peningkatan IPM.
10	Informan 10	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu	Berperan dalam perumusan dan koordinasi kebijakan pendidikan daerah, sehingga dapat memberikan perspektif kebijakan makro dan keterkaitan Program KIP Kuliah dengan strategi peningkatan IPM di tingkat provinsi.
11	Informan 11	Plt. Kepala BPS Kota Bengkulu	Memiliki otoritas dan keahlian dalam penyediaan data statistik pembangunan, khususnya IPM, sehingga penting untuk menjelaskan indikator IPM pendidikan dan relevansinya dengan kebijakan KIP Kuliah.

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan observasi lapangan dan dokumen resmi. Analisis data dilakukan secara induktif dengan menggunakan model interaktif (Miles, M. B et al., 2014) yang mencakup tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Peneliti juga mengadopsi

kerangka evaluasi kebijakan publik menurut (Dunn, W. N, 2018) yang mencakup enam dimensi evaluatif: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Pendekatan ini digunakan untuk menilai kontribusi program KIP Kuliah terhadap IPM tidak hanya dari segi output administratif, tetapi dari segi outcome yang mencerminkan capaian pembangunan manusia di tingkat daerah (Lugina & Sutrisno, 2025).

KERANGKA TEORI

Dalam menganalisis pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebagai bagian dari kebijakan publik di bidang pendidikan, teori kebijakan publik menjadi landasan konseptual yang fundamental (Asiska & Syabila, 2025; Khairunnisa et al., 2024; Neysa Aulia et al., 2024; P. A. Putri et al., 2025). Kebijakan publik dipahami sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang dirancang oleh pemerintah untuk merespons persoalan publik tertentu, termasuk ketimpangan akses pendidikan tinggi. Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah evaluasi kebijakan, yang berfungsi untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai tujuan yang direncanakan. (Dunn, W. N, 2018) menegaskan bahwa evaluasi kebijakan tidak hanya berorientasi pada hasil akhir (*outcomes*), tetapi juga pada proses implementasi dan dampak yang ditimbulkan. Evaluasi kebijakan dilakukan melalui sejumlah kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan (*adequacy*), pemerataan (*equity*), responsivitas, dan ketepatan sasaran (*appropriateness*). Dimensi-dimensi ini memberikan kerangka analitis yang sistematis untuk menilai apakah suatu program publik benar-benar memberikan manfaat bagi kelompok sasaran. Dalam konteks KIP Kuliah, pendekatan evaluatif ini relevan untuk menilai sejauh mana program mampu memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga miskin dan berprestasi, serta bagaimana pelaksanaannya dijalankan oleh perguruan tinggi sebagai pelaksana kebijakan di tingkat lokal.

Selanjutnya, untuk mengkaji kontribusi Program KIP Kuliah terhadap pembangunan manusia, penelitian ini menggunakan konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Firlian et al., 2025; Firmansyah et al., 2024). IPM merupakan indikator komposit yang dirancang untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak (Baharin et al., 2019). Fokus penelitian ini diarahkan pada dimensi pendidikan, karena Program KIP Kuliah secara langsung beririsan dengan upaya peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan tinggi (N. K. B. A. Putri et al., 2025). Dimensi pendidikan dalam IPM diukur melalui dua indikator utama, yakni Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). HLS merefleksikan peluang anak usia sekolah untuk menikmati pendidikan formal di masa depan, sedangkan RLS menggambarkan akumulasi pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk usia dewasa. (Lugina & Sutrisno, 2025; Ravallion, 2010; Wasahua, 2026) menekankan bahwa peningkatan kedua indikator tersebut menunjukkan keberhasilan negara atau daerah dalam memperluas kesempatan belajar dan memperpanjang masa sekolah penduduk. Dengan demikian, keberadaan Program KIP Kuliah sebagai kebijakan afirmatif dapat dianalisis kontribusinya terhadap peningkatan HLS dan RLS, khususnya di wilayah perkotaan seperti Kota Bengkulu yang memiliki konsentrasi perguruan tinggi dan mahasiswa penerima KIP Kuliah.

Untuk memperkuat analisis evaluatif, penelitian ini juga mengadopsi perspektif efektivitas kebijakan sosial sebagaimana dikemukakan oleh (Howlett, M., & Ramesh, M, 2003). Mereka menyatakan bahwa efektivitas kebijakan sosial tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan kebijakan tersebut dalam menjangkau kelompok sasaran yang tepat, mengurangi ketimpangan struktural, serta mendorong perubahan status sosial yang diharapkan. Dalam konteks pendidikan tinggi, kebijakan afirmatif seperti KIP Kuliah harus dipahami sebagai instrumen redistribusi kesempatan (*redistribution of opportunity*) yang bertujuan memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Oleh karena itu, efektivitas KIP Kuliah tidak cukup dinilai dari peningkatan angka partisipasi mahasiswa penerima, tetapi juga dari dampaknya terhadap keberlanjutan studi, penurunan risiko putus kuliah, dan peluang mobilitas sosial mahasiswa dari keluarga prasejahtera. Pendekatan ini menempatkan pendidikan tinggi sebagai modal sosial dan ekonomi yang strategis dalam pembangunan manusia.

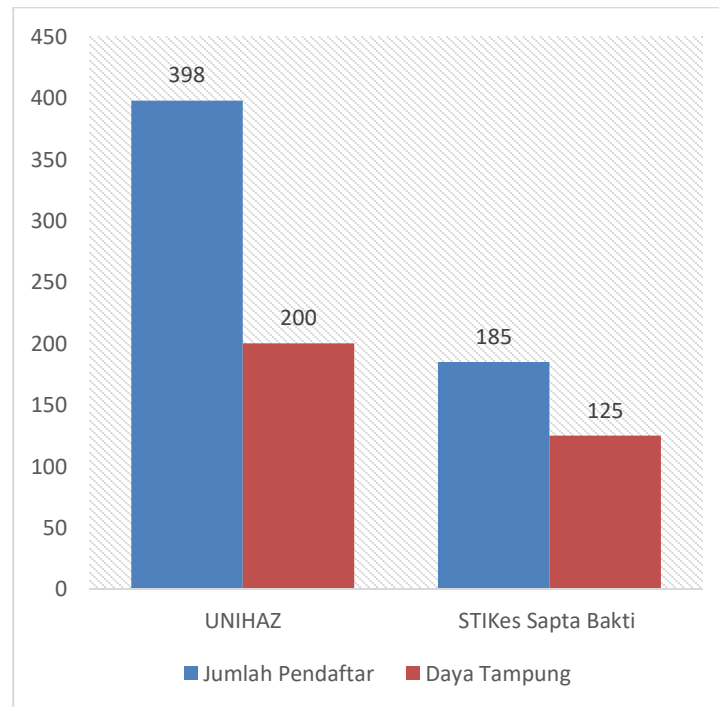
Berdasarkan integrasi teori kebijakan publik, konsep IPM, dan perspektif efektivitas kebijakan sosial, penelitian ini membangun kerangka analisis yang menempatkan Program KIP Kuliah sebagai variabel kebijakan yang dievaluasi melalui dimensi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan sasaran, serta dikaitkan dengan dampaknya terhadap indikator pendidikan dalam IPM (Weiss et al., 2019). Kerangka ini memungkinkan analisis yang komprehensif antara aspek implementasi kebijakan di tingkat perguruan tinggi dan dampaknya terhadap pembangunan manusia di tingkat daerah (Firlian et al., 2025; Lugina & Sutrisno, 2025; Ravallion, 2010). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran empiris tentang pelaksanaan KIP Kuliah di Kota Bengkulu, tetapi juga berkontribusi secara teoretis dalam memperkaya kajian kebijakan pendidikan, khususnya terkait hubungan antara kebijakan afirmatif pendidikan tinggi dan peningkatan kualitas pembangunan manusia. Kerangka teori ini sekaligus menjadi dasar untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai sejauh mana Program KIP Kuliah efektif dalam mendukung peningkatan IPM dimensi pendidikan secara inklusif dan berkeadilan .

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

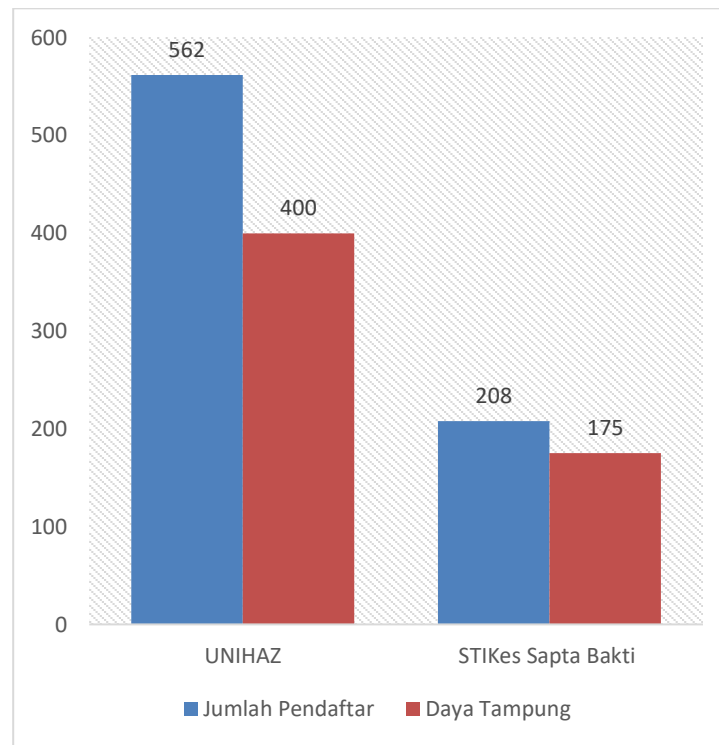
Efektivitas

Efektivitas program KIP Kuliah di Kota Bengkulu tercermin dari meningkatnya partisipasi mahasiswa dari kalangan ekonomi tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Informan menyebutkan bahwa program ini memberi peluang kepada mahasiswa dari keluarga petani, buruh, dan daerah pinggiran kota untuk kuliah (Asiska & Syabila, 2025; Diana & Yustie, 2025; Luqman et al., 2023; Neysa Aulia et al., 2024; Setyaningrum, 2024). Ditemukan bahwa program KIP Kuliah telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan jumlah pendaftar dari kalangan tidak mampu setiap tahunnya. Komposisi mahasiswa baru di UNHAZ dan STIKes Sapta Bakti kini sebagian besar adalah penerima KIP Kuliah. Perbandingan antara data tahun 2022 dan 2023 menunjukkan adanya peningkatan signifikan baik pada jumlah pendaftar maupun daya tampung Program KIP Kuliah di dua perguruan tinggi yang diteliti, yaitu

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH (UNIHAZ) dan STIKes Sapta Bakti. Pada tahun 2022, UNIHAZ mencatat jumlah pendaftar KIP Kuliah sebanyak 398 orang dengan daya tampung 200 orang, sedangkan pada tahun 2023 jumlah pendaftar meningkat tajam menjadi 562 orang dengan daya tampung naik menjadi 400 orang. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan minat masyarakat terhadap Program KIP Kuliah yang cukup besar, khususnya di UNIHAZ. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap program KIP Kuliah sebagai instrumen akses pendidikan tinggi bagi kelompok ekonomi lemah, sekaligus mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang masih sangat bergantung pada bantuan pendidikan pemerintah. Sementara itu, STIKes Sapta Bakti juga mengalami peningkatan jumlah pendaftar dari 185 orang pada tahun 2022 menjadi 208 orang pada tahun 2023, dengan daya tampung yang meningkat dari 125 menjadi 175 orang. Walaupun peningkatannya tidak sebesar UNIHAZ, tren ini tetap menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap KIP Kuliah terus bertambah dari tahun ke tahun.



Gambar 1. Jumlah Mahasiswa KIP untuk Pendaftar dan daya tampung Tahun 2022



Gambar 1. Jumlah Mahasiswa KIP untuk Pendaftar dan daya tampung Tahun 2023

Jika dianalisis lebih lanjut, peningkatan daya tampung pada tahun 2023 menunjukkan adanya respons kebijakan dari pihak perguruan tinggi maupun pemerintah dalam upaya mengakomodasi lonjakan pendaftar KIP Kuliah. Di UNIHAZ, peningkatan daya tampung sebesar 200 kursi (dari 200 menjadi 400) berhasil mengurangi kesenjangan antara jumlah pendaftar dan kapasitas penerimaan, meskipun jumlah pendaftar tetap lebih tinggi. Pada tahun 2022, rasio antara pendaftar dan daya tampung di UNIHAZ menunjukkan persaingan yang sangat ketat, sementara pada tahun 2023 rasio tersebut menjadi lebih seimbang, meskipun belum sepenuhnya ideal. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan pada aspek kecukupan program, namun masih menyisakan persoalan pemerataan dan keterbatasan kuota. Di STIKes Sapta Bakti, selisih antara pendaftar dan daya tampung pada tahun 2023 terlihat semakin kecil dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas penerimaan relatif lebih mampu menyesuaikan dengan kebutuhan. Kondisi ini menandakan adanya perbaikan dalam pengelolaan kuota KIP Kuliah, meskipun belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh calon mahasiswa yang berminat dan memenuhi syarat.

Secara substantif, perbandingan data tahun 2022 dan 2023 memperlihatkan bahwa Program KIP Kuliah di Kota Bengkulu mengalami perkembangan positif dari sisi daya tampung, namun sekaligus menegaskan masih tingginya tekanan permintaan terhadap program ini. Peningkatan jumlah pendaftar dari tahun ke tahun mencerminkan masih kuatnya hambatan ekonomi yang dihadapi lulusan SMA/SMK untuk melanjutkan pendidikan tinggi tanpa dukungan beasiswa. Dalam konteks pembangunan manusia, kondisi ini memiliki implikasi penting terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pada dimensi pendidikan. Ketika daya tampung KIP Kuliah belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh pendaftar, maka peluang peningkatan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah berpotensi

terhambat. Oleh karena itu, meskipun terdapat peningkatan kapasitas pada tahun 2023, hasil perbandingan ini menegaskan perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap aspek kecukupan, pemerataan, dan efektivitas Program KIP Kuliah. Evaluasi tersebut penting agar peningkatan jumlah pendaftar tidak hanya direspons secara administratif, tetapi juga diiringi dengan perencanaan kebijakan yang lebih strategis, sehingga Program KIP Kuliah benar-benar dapat berkontribusi secara optimal dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi dan memperkuat capaian IPM pendidikan di Kota Bengkulu.

Efisiensi

Efisiensi pelaksanaan Program KIP Kuliah pada tahap awal implementasi, khususnya pada semester pertama, masih menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, hambatan utama muncul pada proses verifikasi data penerima dan pencairan dana bantuan. Gangguan sistem daring, ketidaksesuaian dokumen administrasi mahasiswa, serta belum sepenuhnya terintegrasinya prosedur pelayanan secara digital menyebabkan keterlambatan pencairan dana, terutama bagi mahasiswa baru (Ravallion, 2010). Kondisi ini berdampak pada munculnya kebingungan dan ketidakpastian di kalangan penerima KIP Kuliah, yang pada awal masa perkuliahan masih berada pada fase adaptasi akademik dan ekonomi (Wasahua, 2026). Selain itu, keterbatasan pemahaman mahasiswa terhadap alur administrasi program turut memperlambat proses, sehingga efisiensi waktu dan sumber daya belum tercapai secara optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa pada fase awal, pelaksanaan program masih memerlukan penyesuaian sistem dan peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, baik di tingkat perguruan tinggi, pengelola pusat, maupun bank penyalur (Firlian et al., 2025).



Gambar 2. Proses efisien KIP Kuliah di Kampus

Namun demikian, hasil observasi dan wawancara lanjutan menunjukkan adanya perbaikan efisiensi pada semester-semester berikutnya. Perguruan tinggi mulai menerapkan alur pelayanan yang lebih terstruktur, menyediakan pendampingan administratif bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah, serta meningkatkan koordinasi dengan bank penyalur untuk mempercepat proses pencairan dana. Penguatan sistem informasi dan peningkatan pengalaman operator dalam mengelola program turut berkontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan. Selain itu, mahasiswa penerima KIP Kuliah pada semester lanjutan dinilai lebih memahami mekanisme program, sehingga kesalahan administratif dapat diminimalkan (Luqman et al., 2023). Perbaikan ini berdampak pada percepatan waktu pencairan dan pengurangan beban administratif, baik bagi mahasiswa maupun pengelola program. Meskipun efisiensi pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal integrasi sistem digital dan penyederhanaan prosedur (Lugina & Sutrisno, 2025), temuan penelitian menunjukkan adanya perbaikan yang bersifat progresif dari waktu ke waktu. Hal ini mengindikasikan bahwa Program KIP Kuliah memiliki kapasitas adaptif dalam pelaksanaannya, meskipun masih memerlukan penyempurnaan berkelanjutan agar penggunaan waktu, biaya, dan sumber daya dapat dikelola secara lebih efisien dan berkelanjutan (Firlan et al., 2025; Lugina & Sutrisno, 2025).

Kecukupan

Kecukupan bantuan KIP Kuliah masih menjadi isu krusial dalam implementasinya di Kota Bengkulu, khususnya jika dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi mahasiswa penerima yang mayoritas berasal dari keluarga prasejahtera. Meskipun komponen biaya pendidikan berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT) telah sepenuhnya ditanggung oleh program, bantuan biaya hidup dinilai belum mencerminkan kebutuhan riil mahasiswa di wilayah perkotaan. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar mahasiswa menyampaikan bahwa bantuan biaya hidup hanya mampu mencukupi kebutuhan selama dua hingga tiga bulan, sementara satu semester perkuliahan berlangsung selama enam bulan. Kondisi ini menempatkan mahasiswa pada situasi rentan secara ekonomi, terutama bagi mereka yang tidak memiliki dukungan finansial tambahan dari keluarga. Besaran bantuan hidup sebesar Rp950.000 per bulan dianggap belum adaptif terhadap tingginya biaya kebutuhan dasar di Kota Bengkulu, seperti biaya sewa tempat tinggal, transportasi, konsumsi, dan kebutuhan akademik penunjang. Ketidacukupan ini berpotensi mendorong mahasiswa untuk mencari pekerjaan sampingan yang dapat mengganggu fokus dan keberlanjutan studi (Lugina & Sutrisno, 2025).

Dari perspektif pemangku kebijakan, baik informan dari legislatif maupun pemerintah daerah menilai bahwa skema bantuan KIP Kuliah perlu dievaluasi secara lebih kontekstual. Penentuan besaran bantuan yang selama ini didasarkan pada klasifikasi wilayah dianggap kurang sensitif terhadap kondisi ekonomi riil keluarga penerima. Informan menekankan pentingnya pendekatan berbasis kondisi sosial ekonomi keluarga, seperti tingkat pendapatan, jumlah tanggungan, dan kerentanan ekonomi, bukan semata-mata lokasi geografis tempat tinggal mahasiswa. Apabila aspek kecukupan ini tidak diperbaiki, maka tujuan utama KIP Kuliah sebagai instrumen peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan tinggi berisiko

tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, kecukupan bantuan menjadi faktor penentu keberhasilan program dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dimensi pendidikan di Kota Bengkulu.

Pemerataan

Pemerataan akses dalam pelaksanaan Program KIP Kuliah di Kota Bengkulu masih menghadapi berbagai kendala struktural dan administratif. Meskipun secara normatif proses seleksi telah mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta dokumen resmi lainnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat calon mahasiswa dari keluarga miskin yang tidak terjangkau oleh program ini. Hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan dokumen administrasi, kurangnya literasi informasi, serta minimnya pemahaman prosedur pendaftaran di kalangan masyarakat prasejahtera (Setyaningrum, 2024). Informan menyebutkan bahwa kondisi ini menyebabkan terjadinya ketimpangan, di mana mahasiswa yang secara ekonomi layak justru tersisih, sementara mereka yang lebih siap secara administratif memiliki peluang lebih besar untuk lolos seleksi. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemerataan akses belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar kebijakan KIP Kuliah.

Pihak kampus sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan tersebut, salah satunya melalui kegiatan visitasi lapangan guna memverifikasi kondisi ekonomi calon penerima. Namun, pelaksanaan visitasi ini masih bersifat terbatas dan belum dilakukan secara sistematis karena keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Selain itu, kegiatan sosialisasi program dinilai belum menjangkau komunitas marjinal secara optimal, terutama di wilayah pinggiran kota dan kelompok masyarakat dengan akses informasi yang rendah (Setyaningrum, 2024). Oleh karena itu, informan merekomendasikan penguatan sistem verifikasi berbasis pendekatan hybrid, yakni mengombinasikan data administratif dengan verifikasi faktual di lapangan, serta peningkatan intensitas dan jangkauan sosialisasi. Dengan pemerataan akses yang lebih baik, program KIP Kuliah diharapkan mampu menjangkau kelompok sasaran secara lebih adil dan berkontribusi pada pemerataan capaian pendidikan tinggi sebagai komponen penting dalam peningkatan IPM daerah (Dunn, W. N, 2018).

Responsivitas

Responsivitas Program KIP Kuliah di Kota Bengkulu secara umum dinilai cukup baik oleh para informan, baik dari kalangan mahasiswa maupun pengelola program di tingkat kampus. Kemudahan dalam proses pendaftaran melalui sistem daring, mekanisme pencairan dana langsung ke rekening mahasiswa, serta adanya pendampingan administratif dari pihak kampus menjadi aspek positif yang diapresiasi oleh penerima manfaat (Firlian et al., 2025). Mahasiswa menyatakan bahwa sistem digital yang diterapkan mempermudah akses dan mengurangi potensi hambatan birokrasi yang berbelit. Selain itu, keberadaan helpdesk dan saluran komunikasi informal seperti grup WhatsApp dianggap membantu mahasiswa dalam memperoleh informasi terkait teknis pencairan dan penggunaan dana. Secara umum, responsivitas ini

mencerminkan komitmen penyelenggara program dalam memberikan layanan yang relatif cepat dan mudah diakses (Tohiroh et al., 2025).

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan dalam aspek responsivitas, terutama terkait literasi digital mahasiswa baru dan pola komunikasi yang masih bersifat pasif. Tidak semua mahasiswa memiliki kemampuan yang memadai dalam mengakses dan memahami sistem digital yang digunakan, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan dan keterlambatan dalam proses administrasi (Diana & Yustie, 2025; Ravallion, 2010). Selain itu, inisiatif kampus dalam menyebarluaskan informasi layanan masih terbatas, di mana mahasiswa diharapkan aktif mencari informasi secara mandiri. Sosialisasi dari bank penyalur dinilai membantu, namun belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pendampingan kampus (P. A. Putri et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan strategi komunikasi yang lebih aktif, inklusif, dan berkelanjutan agar responsivitas program tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan mahasiswa secara komprehensif. Peningkatan responsivitas ini akan memperkuat efektivitas KIP Kuliah sebagai instrumen peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan kualitas pembangunan manusia (Diana & Yustie, 2025; Ravallion, 2010).

Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran dalam pelaksanaan Program KIP Kuliah di Kota Bengkulu masih menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius (Diana & Yustie, 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mayoritas penerima program berasal dari keluarga tidak mampu, masih ditemukan kasus mahasiswa yang secara ekonomi tergolong tidak layak namun tetap lolos sebagai penerima bantuan. Informan mengaitkan kondisi ini dengan lemahnya proses validasi data awal, baik yang bersumber dari sekolah maupun dari rekomendasi pihak tertentu yang tidak sepenuhnya objektif. Ketidakakuratan data tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan, karena mengurangi peluang mahasiswa yang benar-benar membutuhkan untuk memperoleh bantuan (P. A. Putri et al., 2025). Fenomena ini juga berimplikasi pada efisiensi penggunaan anggaran negara dalam program bantuan pendidikan. Pihak kampus umumnya melakukan tindak lanjut berupa klarifikasi dan evaluasi ulang terhadap penerima yang terindikasi tidak memenuhi kriteria, termasuk penghentian bantuan apabila ditemukan pelanggaran (Khairunnisa et al., 2024). Namun, langkah ini bersifat korektif dan dilakukan setelah bantuan berjalan, sehingga belum sepenuhnya mencegah kesalahan sejak tahap awal seleksi. Informan dari kalangan pemangku kebijakan menekankan pentingnya penguatan sistem verifikasi berbasis DTKS yang diperbarui secara berkala, serta pelibatan unsur masyarakat seperti RT/RW dan pihak sekolah dalam proses penilaian kelayakan. Pendekatan ini dinilai sejalan dengan regulasi terbaru dan mampu meningkatkan akurasi penargetan program. Ketepatan sasaran menjadi kunci utama dalam menjamin keberlanjutan, legitimasi, dan keadilan Program KIP Kuliah, sekaligus memastikan kontribusinya terhadap peningkatan IPM (Ravallion, 2010), khususnya pada dimensi pendidikan di Kota Bengkulu.

Dampak terhadap IPM

KIP Kuliah berkontribusi nyata terhadap peningkatan IPM Kota Bengkulu. Informan menyatakan bahwa program ini mendorong peningkatan angka melek huruf dan memperpanjang masa pendidikan formal bagi mahasiswa dari keluarga miskin (Khairunnisa et al., 2024). Hal ini juga mendorong kesadaran pendidikan di lingkungan keluarga penerima. Tabel berikut menyajikan hasil temuan penelitian mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) beserta komponen penyusunnya menurut kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Data dalam tabel ini mencakup indikator Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta pengeluaran per kapita yang digunakan untuk menggambarkan capaian pembangunan manusia, khususnya pada dimensi pendidikan. Penyajian data ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran komparatif antarwilayah serta menjadi dasar analisis keterkaitan antara capaian pendidikan, pelaksanaan Program KIP Kuliah, dan kontribusinya terhadap peningkatan IPM, terutama di Kota Bengkulu sebagai wilayah dengan capaian IPM tertinggi.

Tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2023

Kabupaten/Kota	UHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran per Kapita (Ribu/Orang/Tahun)	IPM
Bengkulu Selatan	72,87	13,65	9,41	10657,00	74,06
Rejang Lebong	73,67	14,19	8,80	10848,00	74,43
Bengkulu Utara	73,03	12,91	8,11	11188,00	72,27
Kaur	72,74	13,14	8,41	9365,00	70,92
Seluma	72,71	13,32	8,13	8949,00	70,27
Mukomuko	73,71	12,86	8,56	11075,00	73,00
Lebong	72,59	12,90	8,26	12012,00	72,95
Kepahiang	72,26	13,14	8,36	10044,00	71,38
Bengkulu Tengah	72,46	13,46	7,51	10114,00	70,81
Kota Bengkulu	74,43	16,06	11,83	14924,00	83,38
Provinsi Bengkulu	73,11	13,74	9,03	11172,00	74,30

Catatan: UHH dihitung menggunakan hasil *Long Form* SP2020. UHH (Umur Harapan Hidup): HLS (Harapan Lama Sekolah): RLS (Rata-rata Lama Sekolah)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, 2023.

Hasil temuan Tabel 2. IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa Kota Bengkulu menempati posisi tertinggi dengan capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 11,83 tahun dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 16,06 tahun, jauh melampaui rata-rata Provinsi Bengkulu yang masing-masing tercatat sebesar 9,03 tahun dan 13,74 tahun. Capaian ini merefleksikan keberhasilan relatif Kota Bengkulu dalam menyediakan akses dan keberlanjutan pendidikan formal hingga jenjang menengah atas dan pendidikan tinggi. Dalam kerangka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), RLS merupakan indikator kunci pada dimensi pendidikan yang menggambarkan tingkat akumulasi pendidikan penduduk usia dewasa. Tingginya RLS Kota Bengkulu mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk tidak hanya

mampu mengakses pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga memiliki peluang yang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Namun demikian, capaian agregat tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan akses pendidikan, karena masih terdapat kelompok masyarakat miskin perkotaan yang berpotensi terhambat oleh keterbatasan ekonomi (Indri Arrafi Juliannisa & Siswantini, 2019b).

Dalam konteks ketimpangan akses tersebut, Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah berperan sebagai instrumen kebijakan afirmatif yang secara langsung memengaruhi peningkatan indikator pendidikan dalam IPM (Asiska & Syabila, 2025). Program ini memberikan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa dari keluarga prasejahtera, sehingga mampu menurunkan hambatan ekonomi yang selama ini menjadi faktor utama rendahnya partisipasi pendidikan tinggi. Temuan lapangan menunjukkan bahwa mahasiswa penerima KIP Kuliah di Kota Bengkulu tidak hanya memperoleh akses masuk ke perguruan tinggi, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan keberlanjutan studi hingga lulus tepat waktu. Kondisi ini berdampak pada perpanjangan masa sekolah penduduk usia produktif, yang secara statistik berkontribusi terhadap peningkatan RLS. Dengan demikian, implementasi KIP Kuliah tidak hanya berdampak pada individu penerima manfaat, tetapi juga memberikan kontribusi struktural terhadap peningkatan kualitas pendidikan masyarakat secara keseluruhan (Luqman et al., 2023). Data BPS tahun 2023 juga menunjukkan bahwa IPM Kota Bengkulu mencapai 83,38 dan tergolong sangat tinggi, dengan kontribusi utama berasal dari dimensi pendidikan. Selain tingginya HLS dan RLS, peningkatan IPM pendidikan di Kota Bengkulu turut dipengaruhi oleh keterlibatan aktif mahasiswa dari kelompok ekonomi terbawah yang difasilitasi melalui Program KIP Kuliah. Sebagian besar penerima KIP Kuliah merupakan lulusan SMA/SMK dari keluarga berpenghasilan rendah dan bahkan menjadi generasi pertama di keluarganya yang menempuh pendidikan tinggi (Weiss et al., 2019). Hal ini menegaskan bahwa KIP Kuliah berperan tidak hanya sebagai bantuan finansial, tetapi juga sebagai instrumen mobilitas sosial yang memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) daerah. Dengan membuka akses pendidikan tinggi secara lebih inklusif, KIP Kuliah berkontribusi pada pemerataan kesempatan pendidikan yang pada akhirnya memperkuat dimensi pendidikan dalam IPM (Purwanto et al., 2024).

Keunggulan capaian pendidikan Kota Bengkulu tidak terlepas dari peran strategis perguruan tinggi sebagai pelaksana Program KIP Kuliah, khususnya Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH (UNIHAZ), STIKes Sapta Bakti, dan STIKes Bakti Husada. Kampus-kampus tersebut berfungsi sebagai simpul utama penyedia pendidikan tinggi di Provinsi Bengkulu dan menjadi tujuan utama mahasiswa penerima KIP, baik yang berasal dari Kota Bengkulu maupun dari kabupaten lain. Temuan penelitian menunjukkan bahwa jumlah pendaftar KIP Kuliah di UNIHAZ dan STIKes Sapta Bakti secara konsisten lebih besar dibandingkan daya tampung pada tahun 2022 dan 2023, yang mengindikasikan tingginya kebutuhan masyarakat miskin terhadap akses pendidikan tinggi. UNIHAZ, sebagai perguruan tinggi dengan daya tampung terbesar, menampung lebih banyak mahasiswa penerima KIP Kuliah, sehingga memiliki kontribusi signifikan dalam memperpanjang RLS penduduk usia produktif. Sementara itu, STIKes Sapta Bakti dan STIKes

Bakti Husada, meskipun memiliki daya tampung lebih terbatas, berperan penting dalam menyediakan pendidikan vokasional dan kesehatan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja (Diana & Yustie, 2025). Lebih jauh, keterkaitan antara kampus pelaksana KIP Kuliah dan peningkatan IPM terlihat dari kontribusi tidak langsung terhadap indikator pendidikan lainnya, seperti penurunan risiko putus kuliah dan peningkatan keberlanjutan studi mahasiswa (Neysa Aulia et al., 2024; N. K. B. A. Putri et al., 2025; Yuliansyah, 2021). Mahasiswa penerima KIP Kuliah di ketiga kampus tersebut memperoleh pembebasan biaya kuliah serta bantuan biaya hidup yang memungkinkan mereka fokus pada proses akademik tanpa tekanan ekonomi berlebih. Kondisi ini meningkatkan peluang mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan tepat waktu, yang secara agregat memperkuat nilai RLS dan mendukung peningkatan IPM pendidikan Kota Bengkulu. Oleh karena itu, evaluasi pelaksanaan KIP Kuliah di UNHAZ, STIKes Sapt Bakti, dan STIKes Bakti Husada menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kontribusi pendidikan tinggi terhadap IPM tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berdampak pada pembangunan manusia (Firmansyah et al., 2024). Evaluasi yang komprehensif memungkinkan identifikasi kendala dalam distribusi kuota, efisiensi pelaksanaan, dan ketepatan sasaran penerima, sehingga penguatan tata kelola KIP Kuliah di perguruan tinggi dapat menjadi kunci dalam mendorong pembangunan manusia yang inklusif dan berkelanjutan (Ninghardjanti et al., 2023).

KESIMPULAN

Perspektif evaluasi kebijakan publik, temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dan responsivitas Program KIP Kuliah tergolong baik, terutama dalam aspek perluasan akses dan mekanisme pelayanan berbasis digital. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa efisiensi, kecukupan bantuan, pemerataan, dan ketepatan sasaran masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan administratif. Keterlambatan pencairan dana pada fase awal, keterbatasan kecukupan biaya hidup, serta ketimpangan akses akibat kendala administrasi dan literasi informasi menunjukkan bahwa keberhasilan program belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, meskipun KIP Kuliah telah berkontribusi positif terhadap peningkatan IPM pendidikan Kota Bengkulu, kontribusi tersebut masih bersifat parsial dan memerlukan penguatan tata kelola agar dampaknya lebih merata dan berkelanjutan. Capaian IPM tidak dapat dilepaskan dari peran strategis pendidikan tinggi dan implementasi KIP Kuliah sebagai kebijakan afirmatif. Perguruan tinggi pelaksana KIP Kuliah berfungsi sebagai simpul utama dan mendorong mobilitas sosial kelompok tidak mampu perkotaan. Dengan demikian, Program KIP Kuliah tidak hanya berperan sebagai instrumen bantuan pendidikan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan manusia yang memperkuat kualitas sumber daya manusia daerah.

Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pengelola program KIP Kuliah dalam memperbaiki aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan sasaran. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian kebijakan publik di bidang pendidikan dengan mengintegrasikan evaluasi

program bantuan pendidikan tinggi dengan IPM. Kebijakan afirmatif memiliki hubungan struktural dengan indikator IPM sehingga memperkuat argumen bahwa intervensi pendidikan tinggi merupakan faktor kunci dalam pembangunan manusia di daerah. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan cakupan lokasi penelitian terbatas pada Kota Bengkulu dan beberapa perguruan tinggi tertentu, dan penelitian ini lebih menekankan pada pendekatan kualitatif, sehingga belum mengukur secara kuantitatif besaran kontribusi KIP Kuliah terhadap perubahan nilai IPM.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah kajian dengan melibatkan lebih banyak perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, sehingga diperoleh gambaran implementasi Program KIP Kuliah yang lebih komprehensif dan representatif di tingkat regional maupun nasional. Selain itu, penelitian lanjutan perlu mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (*mixed methods*) agar kontribusi Program KIP Kuliah terhadap Indeks Pembangunan Manusia, khususnya pada dimensi pendidikan, dapat diukur secara lebih presisi dan berbasis data statistik yang kuat. Selanjutnya, disarankan pula dilakukan studi longitudinal terhadap lulusan penerima KIP Kuliah untuk menilai dampak jangka panjang program terhadap mobilitas sosial, keberlanjutan pendidikan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui penguatan riset lanjutan tersebut, diharapkan Program KIP Kuliah dapat terus disempurnakan sebagai instrumen kebijakan pendidikan yang efektif, adil, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiska, V., & Syabila, Y. (2025). *ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) DALAM MENINGKATKAN PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA*. 4.
- Baharin, R., Syah Aji, R. H., Yussof, I., & Mohd Saukani, N. (2019). Impact of Human Resource Investment on Labor Productivity in Indonesia. *Iranian Journal of Management Studies*, Online First. <https://doi.org/10.22059/ijms.2019.280284.673616>
- Diana, I. N., & Yustie, R. (2025). *Pengaruh Bantuan Sosial (BPNT, KIP, KIS) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2018-2022*. 8(2).
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis (6th ed.)*. Routledge.
- Firlian, L., Sriliana, I., Afni, D. N., Aflah, U., & Novianti, P. (2025). Analisis Kemiskinan, Ketimpangan, Dan Pengangguran Terhadap IPM Di 3 Provinsi Sumatera Menggunakan Spline Truncated. *JURNAL GAUSSLAN*, 14(2).
- Firmansyah, M. F., Muhammad Ihsan Rizqulloh, Yudha Hadian Nur, & Alek Surya Nugraha. (2024). Fiscal Policy Instruments and Human Development Index: Efforts to Improve the Welfare for Indonesian. *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*, 3(1), 37–52. <https://doi.org/10.32734/ljsp.v3i1.15772>
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems (2nd ed.)*. Oxford University Press.
- Indri Arrafi Juliannisa, & Siswantini, T. (2019a). Improving Human Development Index (HDI) by Illiteracy Eradication (Case Study in Cibadak Village). *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 29–42. <https://doi.org/10.33059/jseb.v11i1.1784>
- Indri Arrafi Juliannisa, & Siswantini, T. (2019b). Improving Human Development Index (HDI) by Illiteracy Eradication (Case Study in Cibadak Village). *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 29–42. <https://doi.org/10.33059/jseb.v11i1.1784>
- Khairunnisa, K., Anedea, T., & Novianti, I. (2024). Evaluasi Penerapan Program KIP-Kuliah Mengacu Pada Pasal 76 UU No. 12 Tahun 2012 Menggunakan Metode Seven Tools di Teknik Industri

- Universitas Pamulang. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(3), 753–762. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i3.1013>
- Lugina, S., & Sutrisno, E. (2025). Improving Human Development Index (HDI) through Education Spending in Bogor Regency. *International Journal of Economics Development Research*, 6(3).
- Luqman, S., Rusmawan, W., Sari, D., Nuryaman, N., Fadjar, A., Yuniarti, R., Fillah, G., & Annisha, Z. (2023). Analysis of Human Development Index in West Java: Education and Health Approach. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 97–105. <https://doi.org/10.32639/jiak.v12i2.311>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Neysa Aulia, Ruth Evelonia Hariani Siburian, Zayna Hayani, & Hairani Siregar. (2024). Benefits and Effectiveness of the KIP Lecture Program for Recipient Students in Accessing Education at Higher Education. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2). <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1932>
- Ninghardjanti, P., Murtini, W., Hindrayani, A., & Sangka, K. B. (2023). Evaluation of the Smart Indonesia Card (KIP) Program for the Vocational Schools in Surakarta City. In A. Kusuma Wardana (Ed.), *Proceedings of the 1st UPY International Conference on Education and Social Science (UPINCESS 2022)* (pp. 217–226). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-39-8_20
- Purwanto, Y., Fitriani, A. N., & Aziz, A. (2024). MEASURING THE DEVELOPMENT OF PERINTIS SCHOLARSHIP BENEFICIARIES BASED ON THE ZAKAT UTILIZATION INDEX (IPZ) AT RUMAH AMAL SALMAN. *Social Finance*.
- Putri, N. K. B. A., Wijaya, K. A. S., & Wirantari, I. D. A. P. (2025). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Tinggi (Studi Kasus: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana). *Socio-political Communication and Policy Review*. <https://doi.org/10.61292/shkr.233>
- Putri, P. A., Handayani, Z., Rakista, R., Ibnayasha, D. Y., Zikra, I., & Saputra, B. (2025). *Evaluasi Implementasi Program Bantuan Pendidikan Di Indonesia: Analisis Efektivitas PIP, KIP Kuliah, Dan BOS Melalui Studi Literatur*. 2(2).
- Ravallion, M. (2010). Troubling Tradeoffs in the Human Development Index. *The World Bank Development Research Group Office of the Director*.
- Setyaningrum, D. (2024). Quality education and human development index. *International Journal of Economic Policy in Emerging Economies*, 20(3/4), 304–311. <https://doi.org/10.1504/IJEPEE.2024.142467>
- Sugino. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tohiroh, T., Saputra, R., Aisha, N., Maulana Alfarisi, S., Anisah Nabila, D., & Balqis, F. Z. (2025). The Influence Of Kip College Scholarships On Learning Motivation And Academic Achievement Of Stie Ganesha Management Study Program Students. *Journal on Education*, 7(2), 9902–9912. <https://doi.org/10.31004/joe.v7i2.7994>
- Wasahua, O. (2026). *The Role Of The Human Development Index on Regional Economic Growth in Java and Sumatra, 2014–2023*. 3(3).
- Weiss, M. R., Kipp, L. E., Phillips Reichter, A., Espinoza, S. M., & Bolter, N. D. (2019). Girls on the Run: Impact of a Physical Activity Youth Development Program on Psychosocial and Behavioral Outcomes. *Pediatric Exercise Science*, 31(3), 330–340. <https://doi.org/10.1123/pes.2018-0168>
- Yuliansyah. (2021). Analysis Of The Human Development Index (HDI) In Indonesia. *Cross-Border Journal of Business Management*, 1(2).